

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Annas Pramesti Aji Gama
Pembimbing: Vidya Vitta Adhivinna
Email: annasd gama@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini memiliki yaitu mengetahui 1) Partisipasi Anggaran, 2) Kejelasan Sasaran Anggaran, 3) Pengawasan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menjadi populasi dalam penelitian ini. Kebutuhan sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yang difokuskan kepala OPD, kepala sub bagian, dan staff keuangan atau anggaran. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, sedangkan Analisa data menggunakan pengujian kualitas data, linier berganda, asumsi klasik, dan hipotesis.

Penelitian menunjukkan hasil uji regresi linier berganda adalah $Y = 8,980 + 0,116 X_1 + 0,229 X_2 + 0,126 X_3 + e$. Hasil penelitian menunjukkan Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai nilai t-hitung 2,270 dengan nilai signifikansi 0,026. Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai t-hitung 2,009 dengan nilai signifikansi 0,048. Pengawasan mempunyai nilai t-hitung 1,428 dengan nilai signifikansi 0,157. Penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bantul karena nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sedangkan Pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bantul karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah

ABSTRAC

This study aims to determine 1) The Effect of Budget Participation, 2) Clarity of Budget Goals, and 3) Supervision of the Performance of Bantul Regency Government Officials.

The population of this research is the entire Regional Apparatus Organization (OPD) in the Local Government of Bantul Regency. Sampling in this study uses purposive sampling technique that is focused on the head of the OPD, the head of subdivisions, and financial staff or Budget staff. Data collection techniques using questionnaires, while data analysis using data quality tests, multiple linear tests, classic assumption tests, and hypothesis testing.

The results showed the multiple linear regression test was $Y = 8,980 + 0,116 X_1 + 0,229 X_2 + 0,126 X_3 + e$. The results showed that the Effect of Budgeting Participation has a t-count of 2.270 with a significance value of 0.026. Clarity of Budget Objectives has a t-count value of 2.009 with a significance value of 0.048. Supervision has a calculated value of 1.428 with a significance value of 0.157. This study shows that the Effect of Budgeting Participation and Budget Targets Clarity affects the performance of local government officials in Bantul Regency because the significance value is less than 0.05. Whereas Oversight has no effect on the performance of Bantul Regency government officials because its significance value is more than 0.05.

Keywords: Local Government Performance

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan keinginan setiap negara di dunia termasuk Indonesia. *Good governance* merupakan keberhasilan pemerintah menjalankan tugas dalam membangun suatu negara untuk mencapai

tujuan yang telah direncanakan. Keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tidak lepas dari kinerja aparat pemerintah yang baik di pemerintah pusat atau daerah. Era globalisasi dan perdagangan bebas menghadapkan pemerintah pada persaingan antar negara.

Pemerintah dituntut mengembangkan potensi di daerah.

Otonomi daerah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayahnya dengan diterbitkan UU No. 23 Tahun 2004. Diterbitkannya Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2014 diharapkan pemerintah daerah mampu memaksimalkan potensi dan sumberdaya daerah dengan baik. Untuk dapat memaksimalkan potensi dan sumberdaya maka dibutuhkan perencanaan dan kinerja aparat pemerintah daerah yang efektif dan efisien berorientasi pada kesejahteraan masyarakat daerah. Tuntutan kinerja aparat pemerintah terdapat dalam PP Nomer 8 Tahun 2006 maka setiap pemerintah daerah wajib melaporkan dan menyusun laporan kinerja. Suatu program dan kebijakan ditetapkan oleh pemerintah yang dibentuk perencanaan strategis untuk mencapai sasaran, tujuan, visi, serta misi (Moehariono, 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran merupakan *blue print* atau rancangan kegiatan serta tujuan yang akan dilakukan dalam satu tahun anggaran. (Mahmudi, 2016). Dalam uu no.17 tahun 2003 mewajibkan pejabat daerah menyusun dan mengelola APBD dan perubahan APBD

Target anggaran yang ada akan membantu aparat pemerintah dalam perbaikan kerja melalui partisipasi penyusunan anggaran (Primadana, 2014), sedangkan di Kota Administrasi Jakarta Barat partisipasi penyusunan anggaran tidak signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah (Hariani dan Veny, 2018). Susilowati (2016) menyatakan dalam penelitiannya kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabupaten Kampar dipengaruhi kejelasan sasaran anggaran. Suatu anggaran dapat di implementasikan secara jelas dengan tujuan anggaran dan dapat dipahami oleh aparat yang menjalannya terhadap pencapaian tujuan sasaran APBD.

PP Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur Pembinaan dan Pengawasan yang bertujuan untuk menjamin kinerja pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien. Kinerja-kinerja manajerial yang dilakukan pemerintah daerah Jayapura penting untuk dilakukan pengawasan dengan membandingkan pelaksanaan yang dilakukan dengan pelaksanaan yang telah direncanakan (Arfiani

2018). Fenomena yang terjadi yang mendorong peneliti melakukan penelitian di kabupaten Bantul pada tahun 2017 pemerintah kabupaten bantul meraih predikat B dan pada tahun 2018 kabupaten Bantul mendapatkan peringkat A (www.menpan.co.id)

Penelitian tentang kinerja aparatur pemerintah daerah sering diteliti namun yang menarik dari penelitian ini peneliti adalah penambahan variabel independen yaitu pengawasan. Penelitian ini merujuk pada penelitian Defitri (2017) yang berjudul Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan variabel partisipasi penyusunan anggaran sebagai (X_1), kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel (X_2), dan pengawasan sebagai variabel (X_3), sedangkan untuk variabel dependennya (Y) penulis menggunakan kinerja aparatur pemerintah daerah. Dalam karya ilmiah ini peneliti, Variabel (X_3) yaitu independen peneliti menggunakan referensi dari penelitian yang telah dilakukan Arfiani (2018) yang menyatakan pengawasan mempengaruhi terhadap kinerja anggaran yang berbasis *value for money*. Perbedaan lain pada karya ilmiah ini adalah populasi yang teliti Kabupaten Bantul.

Identifikasi Masalah

Melihat dari latar belakang dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah adalah partisipasi penyusunan anggaran karena dapat meningkatkan tanggung jawab dalam menjalankan rencana yang sudah disusun bersama. Kejelasan sasaran anggaran dapat meningkatkan kinerja dengan kejelasan sasaran anggaran, aparatur yang bertanggung jawab akan lebih mengerti apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan batasan yang sudah direncanakan sehingga dapat bekerja sesuai yang direncanakan. Kinerja aparat pemerintah daerah akan lebih baik apabila diawasi karena adanya pengawasan akan mengetahui apakah kinerja pemerintah sudah sesuai dengan yang direncanakan dan jika ada penyimpangan dapat segera terdeteksi dan diperbaiki.

Pembatasan Masalah

Penelitian dibatasi pada partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah. Obyek yang diteliti hanya kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sub bagian keuangan dan staff bagian keuangan atau anggaran.

Perumusan

Peneliti Menelaah dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah

2. ?

3. Apakah kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dipengaruhi kejelasan sasaran anggaran berpengaruh?

4. Apakah kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dipengaruhi Pengawasan?

Tujuan

Peneliti ingin menambah refrensi dengan menguji dan mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, Mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, Mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, acuan atau tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Praktik

Diharapkan memberikan implikasi terkait dengan kinerja pemerintah daerah lebih lanjut, serta memberikan informasi tentang kinerja pemerintah daerah melalui proses pengelolaan.

Manfaat organisasi

Penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai acuan dalam implementasi partisipasi penyusunan anggaran, implementasi kejelasan sasaran anggaran dan implementasi pengawasan untuk menilai kinerja aparatnya.

Kajian Teori

Partisipasi merupakan suatu proses dimana adanya keikutsertaan atau peran serta seseorang atau individu dalam menyampaikan saran pendapatnya atau pemikiran. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Partisipasi dapat dikatakan langsung, seseorang atau individu dapat mengajukan pandangan, membahas masalah dan mengajukan pemikirannya untuk menolak atau

yang telah ditulis maka didapatkan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah kinerja aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Bantul dipengaruhi partisipasi penyusunan anggaran

meyetujui pendapat orang lain tanpa perantara, atau secara tidak langsung terjadi apabila seseorang atau individu mendelegasikan haknya kepada orang lain. Suryosubroto (2009) mengemukakan bahwa manfaat partisipasi antara lain sebagai berikut: Kemungkinan keputusan yang diambil benar lebih besar, referensi untuk anggota dalam berfikir kreatif, memotivasi untuk lebih memikirkan untuk kepentingan bersama. Memberikan rasa bertanggung jawab karena telah berpartisipasi, lebih fleksibel terhadap perubahan yang terjadi.

Hansen dan Mowen (2013) mengatakan partisipasi dalam anggaran merupakan metode pendekatan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada mener sehingga meningkatkan kreatifitasnya. Partisipasi dalam penyusunan anggaran di pemerintah daerah adalah keikutsertaan apartur pemerintah daerah dalam memberikan ide atau gagasan dalam merancang anggaran yang akan diterapkan dimasa depan. Anggaran merupakan perkiraan kinerja yang akan dilaksanakan dan dipakai dalam waktu yang telah ditentukan yang dinyatakan dengan finansial, penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membuat anggaran (Mardiasmo, 2016).

Kejelasan sasaran merupakan penilaian anggaran yang telah ditetapkan dan dapat memberi informasi yang spesifik tentang tujuan yang akan dicapai dan sejauh mana anggaran dipahami oleh pelaksana anggaran atas pelaksanaan anggaran. tujuan anggaran yang jelas akan memudahkan pelaksanaan anggaran mengukur berhasil atau tidaknya kinerja untuk merealisasikan anggaran. Keberhasilan suatu kegiatan organisasi di masa depan diukur dengan visi dan misi, dan keberhasilannya dapat diketahui dari kinerja organisasi (Herawati, 2011).

Ketidajelasan sasaran anggaran akan membuat bingung aparat penanggung jawab pelaksanaan anggaran. Ketidajelasan sasaran suatu anggaran dapat mengaburkan tujuan yang harus dicapai sehingga dapat

menimbulkan penyimpangan kinerja dikarenakan aparat pemerintah daerah tidak mengetahui ukuran-ukuran kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan (Hariani, 2018).

Pengawasan, suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawal kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ukuran kinerja yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan untuk menambah tingkat keberhasilan yang sudah ditetapkan. Pengawasan dapat juga diartikan proses untuk memastikan segala aktivitas dapat terlaksana dengan lancar seperti yang sudah direncanakan. pengawasan bertujuan untuk mengukur atau melihat apakah rencana yg telah ditetapkan telah sesuai dengan apa yang sedang dilakukan (Arifani, 2018).

Kinerja pemerintah daerah merupakan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan rencana, tujuan, visi dan misi secara terukur sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Ilham (2008) mengemukakan 3 alat ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah yaitu: efektivitas

Tingkat seseorang aparat sejah mana mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam menjalankan rencana tugas agar tujuan tercapai dan pencakupan sasaran yang dilayani.

Efisiensi

Efisiensi dilihat dari seberapa minimal sumber daya digunakan dalam pekerjaan atau seberapa tingkat sumber daya yang terbuang. Semakin banyak sumber daya yang terbuang maka kinerja aparat semakin buruk.

Keamanan dan kepuasan pelanggan

Keamanan dan kepuasan adalah sesuatu yang dapat dilihat dari keberadaan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan atau prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Prosedur kerja mampu memberikan jaminan kepada seorang aparat pemerintah daerah secara sistenatis, terkontrol, dan tidak khawatir dalam memberikan pelayanan.

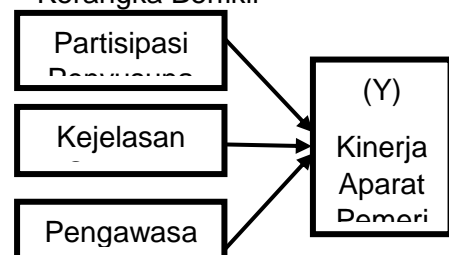
Kerangka Berfikir

Kinerja aparat pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil atau pencapaiannya program yang telah direncanakan di dalam APBD. Aparatur pemerintah daerah dikatakan baik dalam kinerja apabila dapat merealisasikan APBD dengan efektif, ekonomis, dan efisien. Partisipasi dalam APBD dapat memberikan tanggungjawab dan motivasi terhadap rencana yang telah disusun bersama sehingga mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jauh Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) dapat dipahami dan memberikan informasi yang bisa didapat oleh aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik yang sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pekerjaannya.

Pengawasan adalah proses membandingkan kenyataan yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Perbandingan yang dimaksud adalah membandingkan apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh aparat pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau dianggarkan dan jika terjadi ketidaksesuaian dapat segera diketahui dan segera diambil tindakan untuk dibenarkan. Berdasarkan hal tersebut di atas pengawasan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Bantul.

Gambar 1
Kerangka Berfikir



Rumusan Hipotesis

Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten bantul.

Partisipasi aparat dalam penganggaran adalah seberapa sejauh keikutsertaan atau keterlibatan aparat pemerintah daerah didalam menyusun anggaran. Keterlibatan aparatur pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran memberikan rasa tanggung jawab dan motivasi dalam bekerja untuk mencapai tujuan dan program yang telah direncanakan.

H₁: Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran yang terkandung dalam anggaran menunjukan seberapa informasi yang di dapat dari anggaran dan program yang terkandung dapat dimengerti oleh aparat pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran dan program sesuai dengan yang di rencanakan. Kejelasan sasaran anggaran memberikan kemudahan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan tugasnya.

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengaruh pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan aparat pemerintah daerah sudah sesuai dengan yang direncanakan, jika ada ketidaksesuaian dengan rencana atau terjadi penyimpangan dapat segera diketahui dan diambil tindakan pembenahan supaya berjalan sesuai yang direncanakan. Adanya pengawasan dapat menjamin keefektifan dan efisiensi kerja pemerintah daerah.

H₃: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Waktu dan Tempat

Peneliti melakukan Penelitian ini pada organisasi pemerintah daerah. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sekitar bulan Maret-April 2019 yang bertempat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Variabel Penelitian

Penelitian ini memakai skala likert lima poin adalah skala yang menggunakan lima tingkat jawaban yang ada dalam kuesiner dari

sangat tidak setuju sampai sangat setuju (Ghozali, 2012):

Variabel dalam penelitian menggunakan 2 variabel, variabel yang digunakan adalah variabel dependen dan independen.

Dependen (Y)

Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah kinerja aparat pemerintah daerah (Y). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (Sugiono, 2012). Kinerja pemerintah daerah adalah proses atau usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan atau program yang telah direncanakan dalam APBD. Indikator dalam penelitian ini adalah: Pencapaian target anggaran, penyelesaian tugas yang tepat waktu, kualitas dan kuantitas pekerjaan, inisiatif dalam bekerja.

Menurut Sugiono (2012) yang dimaksud variable independen adalah variable yang dapat memberikan dampak atau penyebab munculnya variabel dependen.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 Independen (X) yaitu:

Partisipasi penyusunan anggaran (X₁) adalah keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam menetapkan tujuan serta program yang akan dilakukan yang tertuang dalam anggaran (APBD) dengan indicator yang digunakan adalah keikutsertaan, kepuasan, besarnya pengaruh, kebutuhan memberikan pendapat.

Kejelasan sasaran anggaran (X₂) adalah seberapa jauh kegiatan organisasi pemerintah daerah ditunjukan dengan jelas, dan mudah dipahami oleh aparat yang pelaksanaan anggaran dengan indikator yang digunakan adalah tujuan, kinerja, standar, jangka, waktu, sasaran, tingkat kesulitan, koordinasi.

Pengawasan (X₃) adalah proses pemeriksaan terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sudah berjalan sesuai program yang direncanakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Indikator yang digunakan oleh peneliti adalah: masukan pengawasan, proses pengawasan, keluaran pengawasan.

Indikator yang digunakan adalah kinerja aparat pemerintah daerah (Y), penulis merujuk pada indikator yang digunakan oleh Wulandari (2013). Indikator partisipasi penyusunan anggaran (X₁) dan kejelasan sasaran anggaran

(X₂), penulis menggunakan refrensi dari penelitian yang dilakukan oleh Defitri (2017), sedangkan indikator pengawasan penulis menggunakan refrensi dari penelitian yang dilakukan oleh Arfiani (2018).

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu memberikan nilai atau skor kepada jawaban yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Data ini menjadi data primer, Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang membagikan seperangkat pertanyaan tertulis yang akan dijawab oleh responden (Sugiono 2012).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengambil sampel adalah *purposive sampling*. Dengan Sampel yang diambil adalah kepala OPD, kepala bagian dan, staff bagian sub bagian keuangan atau anggaran. Hal ini bertujuan untuk di dapatkan data yang relevan dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Analisis Data

Uji data

Uji validitas

Tabel 3
Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran.

Variabel	Person Correlation	Sign	kesimpulan
PPA1	0,669	0,000	Valid
PPA2	0,510	0,004	Valid
PPA3	0,705	0,000	Valid
PPA4	0,749	0,000	Valid
PPA5	0,581	0,001	Valid
PPA6	0,722	0,000	Valid
PPA7	0,789	0,000	Valid
PPA8	0,808	0,000	Valid

Tabel 1
Uji Validitas Kejelasan Sasaran Anggaran

Variabel	Person Correlation	Sign	kesimpulan
KJA1	0,669	0,000	Valid
KJA2	0,840	0,000	Valid
KJA3	0,844	0,000	Valid

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS versi 23. Analisis data pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap yaitu tahap pertama uji kualitas data, tahap kedua yaitu analisis regresi linier berganda, tahap ketiga pengujian asumsi klasik, dan tahap keempat pengujian hipotesis. Gozali (2012) mengatakan kuesioner yang valid adalah kuesioner yang dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskripsi Data

Kabupaten Bantul yang dulunya bernama Bantulkarang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 1831 yang dulunya dipimpin oleh Raden Tumenggung Mangun Negoro sebagai bupati. Tanggal 20 juni yang ditetapkan menjadi hari jadi Pemerintah Kabupten Bantul yang selalu diperingati setiap tahunnya. Kabupaten Bantul berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 17 kecamatan, 75 desa, dan 933 dusun dengan titik koordinat antara 07° 44' 04" - 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" - 110° 31' 08" Bujur Timur.

KJA4	0,676	0,000	Valid
KJA5	0,707	0,000	Valid
KJA6	0,689	0,000	Valid
KJA7	0,521	0,004	Valid

Tabel 2
Uji Validitas Pengawasan

Variabel	Person Correlation	Sign	Kesimpulan
PN1	0,839	0,000	Valid
PN2	0,688	0,000	Valid
PN3	0,179	0,349	Tidak Valid
PN4	0,542	0,002	Valid
PN5	0,414	0,015	Valid
PN6	0,599	0,000	Valid
PN7	0,605	0,000	Valid
PN8	0,688	0,000	Valid
PN9	0,687	0,000	Valid
PN10	0,685	0,000	Valid

Tabel 3
Uji Validitas Kinerja

Variabel	Person Correlation	Sign	Kesimpulan
KA1	0,643	0,000	Valid
KA2	0,630	0,000	Valid
KA3	0,597	0,000	Valid
KA4	0,814	0,000	Valid
KA5	0,632	0,000	Valid
KA6	0,785	0,000	Valid

Terlihat pada tabel 3,4,5,6 uji validitas semua item pertanyaan valid kecuali pada tabel 5 pada item pertanyaan P5 tidak valid dan tidak akan digunakan pada pengujian yang selanjutnya.

Reliabilitas

Tabel 4
Reliabilitas

Pengujian	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Partisipasi Penyusunan Anggaran	0,839	8	Sangat reliabel
Kejelasan Sasar Anggar	0,821	7	Sangat reliabel
Pengawasan	0,816	9	Sangat reliabel
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	0,688	6	Reliabel

Terlihat pada tabel 7 uji reliabilitas, partisipasi penyusunan anggaran mendapatkan α 0,839 maka data reliabel. Kejelasan sasaran anggaran mendapatkan α 0,821 maka data dikatakan reliabel. Pengawasan mendapatkan α 0,816 maka data dikatakan reliabel. Kinerja aparat pemerintah

daerah mendapatkan α 0,688 maka data dikatakan reliabel. Data yang reliabel menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner setabil dari waktu ke waktu dan dapat dilakukan pengujian berikutnya.

Linier Bergand

Tabel 5

Regresi Linier Bergandal

Mode	Unstandardized Coefficients		Unstandardized coefficients	T	sig
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	8,980	2,821		3,184	0,002
TOTAL PPA (X1)	0,116	0,051	0,228	2,270	0,026
TOTAL KJA (X2)	0,229	0,114	0,240	2,009	0,048
TOTAL P (X3)	0,126	0,088	0,171	1,429	0,157
F Hitung = 9,900					0,000
Std Error Of The Estimate = 1,830					
Ajusted R ² = 0,229					

data diolah tahun 2019

dengan melihat tabel 8 maka persamaan regresi linier berganda yang diperoleh

$$Y = 8,980 + 0,116X_1 + 0,229X_2 + 0,126X_3 + \epsilon$$

keterangan:

kinerja aparat pemerintah daerah
 konstanta
 partisipasi penyusunan anggaran
 kejelasan sasaran anggaran
 pengawasan
 koefisien regresi
 error

: Y
 : α
 : X_1
 : X_2
 : X_3
 : $0,229\beta_1, \beta_2, \beta_3$
 : e

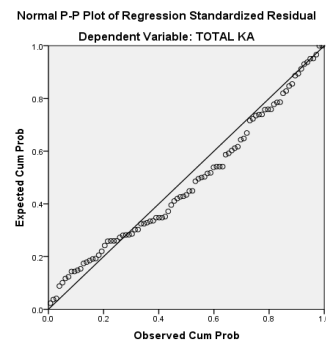
sasaran anggaran dan pengawasan bersama-sama memberikan pengaruh kepada kinerja aparat pemerintah daerah.

Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian simultan (Uji F) pada didapatkan F hitung 9,900 dan nilai signifikansinya 0,000 ($p < 0,05$) yang artinya regresi yang mencakup variabel partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan

Normalitas

Gambar 2
 Grafik P-P Plot



Pada hasil uji normalitas dengan melihat gambar 2 grafik **P-P Plot** dapat dilihat titik-titik berada tidak menjauh dari garis diagonal sesuai dengan ketentuan distribusi

yang dinyatakan normal, dapat diimpulkan bahwa data yg di peroleh terdistribusi dengan normal.

Multikolineari

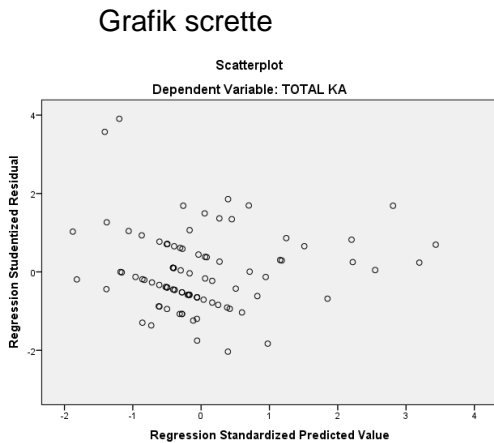
Multikolinearitas

Pengujian	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
Uji Multikolinearitas Partisipasi	Partisipasi penyusunan	0,848	1,180

penyusunan anggaran	anggaran		
Uji Multikolinearitas Kejelasan sasaran anggaran	Kejelasan Sasaran anggaran	0,602	1,661
Uji Multikolinearitas Pengawasan	Pengawasan	0,601	1,663

Tabel 9 menunjukkan hasil yaitu nilai VIF partisipasi penyusunan anggaran $1,180 < 10$ dan *tolerance* $0,848 > 0,10$ maka data partisipasi penyusunan anggaran dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. Berdasarkan uji multikolinieritas kejelasan sasaran anggaran pada tabel menunjukkan nilai VIF $1,661 < 10$ dengan *tolerance* $0,602 > 0,10$ data kejelasan sasaran anggaran dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas. uji multikolinieritas pengawasan menunjukkan hasil VIF $1,663 < 10$ dengan *tolerance* $0,601 > 0,10$ data pengawasan dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Gambar 4



Tabel 10 hasil uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,504 dapat menjelaskan korelasi atau partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan mempengaruhi kinerja aparat pemerintah

Hipotesis

Uji Hetrokedastisitas

Terlihat pada Gambar 3 Grafik *scatterplots* menunjukkan tidak terdapat pola titik-titik tertentu, titik-titik menyebar diantara 0 pada sumbu Y, sehingga trbebas dari masalah pada heteroskedastisitas sehingga variabel lindependen layak dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dengan partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan sebagai variabel independen

Koefisien Determinasi

Tabel 7
Model Summer

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,504 ^a	0,254	0,229	1,830

daerah sebesar 0,504. R 0,504 maka variabel independent dapat menjelaskan 0,504 sedangkan 0,496 dipengaruhi oleh hal atau variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

Kesesuaian Model (Uji F)

Tabel 8
ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	99,424	3	33,141	9,900	0,000 ^b
Residual	291,257	87	3,348		
Total	390,681	90			

Tabel 11 uji anova atau uji F menunjukkan bahwa hasil uji signifikan simultan menunjukkan nilai sebesar 9,900 dengan nilai signifikansi 0,000 dan signifikansi Uji T

yang $< 0,05$ maka variabel X_1 , X_2 , X_3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y

Tabel 16
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Erro	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8,980	2,821		3,184	0,002		
TOTAL	0,116	0,051	0,228	2,270	0,026	0,848	1,180
PPA	0,229	0,114	0,240	2,009	0,048	0,602	1,661
TOTAL KJA	0,126	0,088	0,171	1,429	0,157	0,601	1,663
TOTAL P							

Variabel dependen: (KA)

Variabel independen: (PPA), (KJA), (P)

Dari pengujian Tabel 16 menunjukkan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran memiliki t hitung 2,270 dan nilai signifikansinya 0,026 $< 0,05$ artinya partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. kejelasan sasaran anggaran dengan t hitung 2,009 nilai signifikansinya sebesar 0,048 $< 0,05$ yang berarti variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi terhadap kinerja aparat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Variabel pengawasan memiliki t hitung 1,429 dengan signifikansi 0,157 $> 0,05$ yang artinya variabel pengawasan tidak mempengaruhi kinerja aparat pemerintah Bantul.

Pembahasan Hasil

Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Uji Regresi Linier Berganda menunjukkan nilai partisipasi penyusunan anggaran sebesar 0,116 yang artinya setiap kenaikan 1% variable partisipasi penyusunan anggaran dapat mendorong peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Bantul

0,116 %. Variabel Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran mempunyai nilai t-hitung 2,270 dengan nilai signifikansi 0,026 kurang dari 0,05 menandakan Partisipasi Penyusunan Anggaran mempengaruhi kinerja Aparat Pemerintah Daerah kabupaten Bantul. Dengan Partisipasi Penyusunan Anggaran yang tinggi dapat berpengaruh positif dan dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian di atas menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H1 adalah "Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul", maka H1 diterima. Hal ini dikarenakan dengan ikut serta dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan rasa tanggung jawab aparat pemerintah daerah dengan anggaran yang disusun. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian Susilowati (2016) dan Devitri (2017) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran mempengaruhi terhadap kinerja aparat pemerintah di daerah.

Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pengujian Regresi Linier Berganda yang telah dilakukan menunjukkan Kejelasan Sasaran Anggaran angka 0,229 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variable Kejelasan Sasaran Anggaran akan mendorong 0,229 % peningkatan kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran mempunyai nilai t-hitung 2,009 dengan nilai signifikansi 0,048 menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh karena mendapatkan angka signifikansinya kurang dari 0,05. Peningkatan pada kejelasan sasaran apada anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. penelitian yang telah dilakukan menunjukkan angka signifikansinya lebih kecil dari 0,05 dapat dinyatakan bahwa H2 adalah “Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul”, maka H2 diterima. Sasaran anggaran yang jelas memudahkan aparat pemerintah dalam mengetahui tujuan yang akan dicapai sehingga aparat pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik sehingga dapat efektif dan efisien dalam bekerja dan tidak ragu-ragu dalam menjalankan anggaran. penelitian ini sejalan dan memperkuat penelitian yang dilakukan Susilowati (2016) dan Devitri (2017) yang memperoleh hasil dalam tulisanya yang mengatakan Kejelasan Sasaran Anggaran mepengaruhi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengawasan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul

Pengujian Regresi Linier Berganda yang telah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan Pengawasan sebesar 0,126 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% variable Pengawasan tidak meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebesar 0,126 %. Variabel Pengawasan mempunyai t-hitung 1,428 dan tingkat nilai signifikansi 0,157 menunjukkan bahwa Pengawasan tidak berpengaruh karena memiliki tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan angka signifikansinya $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H3 adalah “Pengawasan tidak berpengaruh terhadap

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul”, maka H3 ditolak. Hal ini dikarenakan karena rasa tanggung jawab aparat pemerintah daerah yang tinggi sehingga ada atau tidaknya pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Arifani (2018) dengan hasil mengatakan pengawasan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah berkonsep *value for money*. Sejalan dengan penelitian yang di lakukan Arifianti (2013) pengawasan internal tidak mempengaruhi kinerja peyelenggaraan pemerintah daerah.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan mengetahui pengaruh partisipasi anggaran kejelasan sasaran anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengawasan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Tingkat partisipasi penyusunan anggaran yang tinggi akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dan tanggung jawab atas anggaran yang telah disepakati bersama.

Kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Dengan Jelasnya anggaran yang disasar akan memudahkan aparat pemerintah daerah mencapai tujuan anggaran dengan lebih efektif dan efisien.

Pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Diawasi atau tidak Kinerja aparat pemerintah daerah akan tetap sama

Implikasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul bahwa partisipasi anggaran, sasaran anggaran yang jelas memberikan peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan untuk pengawasan tidak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diusahakan disusun dengan prosedur ilmiah, namun sebagai manusia pasti masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian, yaitu:

Pengambilan data didasarkan pada pengisian kuesioner karena sibuknya aparatur sipil negara sehingga tidak dapat dilakukan proses wawancara untuk menambah data penelitian.

Proses pengambilan data, informasi menggunakan terkadang tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya karena faktor perbedaan anggapan, faktor perbedaan pemikiran, maupun faktor kejujuran.

Saran

Penelitian ini hanya menggunakan pengisian kuesioner dikarenakan sibuknya aparatur sipil negara dengan segala

Daftar pustaka

Arifani,C. 2018. "Pengaruh profitabilitas transparansi dan pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money (Studi Empiris Pada Pemerintah Jayapura)". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. 13(1).

Arifianti, Hermin., Payamta, Sutaryo, 2013. Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Manado: *Simposium Nasional Akuntansi XVI*.

Defitri,S,Y. 2017. "Pengaruh Prtisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah". *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*. 6(1).

Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Cetakan VI. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hansen dan Mowen. 2013 *Akuntansi Manajeria, edisi delapan, alih bahasa Deni Arnos Kwary*. Jakarta, salemba empat.

aktivitasnya sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilengkapi dengan metode wawancara sehingga informasi yang didapatkan lebih mendukung penelitian.

Partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh yang baik pada kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hendaknya selalu mendorong peningkatan partisipasi penyusunan anggaran anggaran dan kejelasan sasaran anggaran akan menabuh efektivitas dan efisiensi kinerja terhadap aparat pemerintah daerah di kabupaten bantul.

Hariani,S.Veny.2018. "Pengaruh Partisipasi Anggaran Evaluasi Anggarn, Kesulitan Pencapaian Tujuan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah(Studi Empiris Pada Instansi Pemerintah Jakarta Barat". *Profita Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11 (2)

Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*. vol. 13 no.2.

Ilham, Muh. 2008. *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Indra Prahasta.

Mahmudi. 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi: Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Moeheriono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Primadana, H, M, G. Yuniarta, A, G. Adiputra, P, A., 2014 *“Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung)”*. Volume 2, No.1, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suryosubroto. 2009. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Susilowati, N, U. 2016. *“Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, evaluasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah (skpd kabupaten Kampar)”*. JOM FEKON 3(1).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Th. 2014. *Tentang Pemerintah Daerah*. https://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf. (Diunduh 14 November 2018)
- Indonesia. Kementerian BUMN. UU Nomor. 17 Tahun 2003. *tentang Keuangan Negara*. Jakarta. <http://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomorn%2017%20Tahun%202003> (Diunduh 14 Desember 2020)
- Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2019. *Pertama dan Satu-satunya, Pemprov DIY Raih Nilai SAKIP AA*. Makassar <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pertama-dan-satu-satunya-pemprov-diy-raih-nilai-sakip-aa> (Diakses 14 Desember 2020)
- PP No. 12 Tahun 2017. *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/40729/PP%2012%20TAHUN%202017.pdf> (Diunduh 14 Desember 2020)
- PP No. 8 Tahun. 2006. *tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-8-tahun-2006-tetangpelaporan-keuangan-dan-kinerja-instansi-pemerintah/PP82006LAKIP.pdf> (Diunduh 14 Desember 2020)